

**MEMBANGUN KETANGGUHAN KOMUNITAS MELALUI DASAWISMA SIAGA BENCANA
DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

Hendro Wardhono¹, Priyanto², Nur Sayidah³, Siti Marwiyah⁴

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

⁴Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

wardhono@gmail.com; hendro.wardhono@unitomo.ac.id

Received: 04 April 2022; Revised: 30 Mei 2022; Accepted: 15 Juli 2022; Published: Agustus 2022; Available online: Agustus 2022

Abstract

Women as part of society are often 'made' more vulnerable to disasters, through the social roles they develop. Women have less access to resources, for example: social networks and influence, transportation, information, skills (including literacy), control of natural and economic resources, individual mobility, security of housing and work, guarantees of freedom from violence, and ownership of control over decision making. In fact, they are all important in disaster management programs or activities. In essence, women and men respond differently to crisis or disaster situations. In an effort to fight violence, survive and help those who are their dependents, women and men will take different actions. This may be obvious, but experience to date has shown that the gender aspect of a crisis or disaster is often overlooked and not visible when planning interventions. Furthermore, Dasa Wisma is very useful for empowering and increasing the capacity of its members in dealing with disasters in their homes. The Dasa Wisma group and its network have spread to all corners of Indonesia through the PKK (Family Welfare Education) program, which is a very strategic social capital. It is necessary to increase the participation of women in disaster management, so that the coverage of protection for families will be more optimal.

Keywords: *Dasa Wisma, Disaster Risk Reduction, Community.*

sejumlah permasalahan pengurangan risiko bencana tersebut, maka dalam arahan Presiden RI pada saat Rapat Koordinasinal Penanggulangan Bencana Tahun 2021 antara lain menyatakan bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat. Dan itu harus didukung oleh edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Dalam konteks gendre di tingkat lokal bisa menggunakan institusi PKK, khususnya para kader Dasa Wisma.

Dalam konteks kebencanaan, masyarakat lokal merupakan “penanggap pertama” dalam menghadapi bencana. Bantuan pemerintah dan lembaga eksternal lainnya selalu datang belakangan, dan sering mengalami keterlambatan disebabkan oleh beberapa faktor. Itu berarti bahwa berbicara tentang risiko bencana hanya akan terjadi jika komunitas / masyarakat mendapatkan kapasitas mandiri. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk berkompromi dengan lingkungan demi

kelangsungan hidupnya. Pengetahuan dan cara ini merupakan budaya yang tumbuh dalam masyarakat, dan ini juga merupakan modal yang utama dalam pengurangan risiko bencana. Sebagai bangsa Indonesia kita dikenalkan sebuah budaya lokal masyarakat di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh yang dikenal sebagai “Smong”. “Smong” adalah suatu pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi untuk bertindak secara benar dalam menghadapi tsunami. Mekanisme seperti Smong itulah yang dapat disebut sebagai local wisdom.

Begitu juga dengan Dasa Wisma, yang sebenarnya dapat dianggap sebagai ‘local asset’ pada tingkat desa/kelurahan yang keberadaan dan jaringannya sudah menyebar di seluruh pelosok desa/kelurahan di Indonesia. Hal ini merupakan modal sosial yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Namun demikian pemanfaatan Dasa Wisma untuk kegiatan penanggulangan bencana masih ‘jarang disentuh’ karena masih rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan penanggulan bencana baik yang terkendala oleh kultur dan atau stereotipe bahwa kaum perempuan adalah kaum lemah yang tidak perlu bersinggungan dengan

Desa Tangguh Bencana atau DesTaNa merupakan program unggulan nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sesuai Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai action research atau penelitian tindakan, yang dilakukan oleh para peneliti saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebencanaan di Desa Bungurasih, Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Para peneliti juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut sebagai Dosen Pembimbing Lapangan. Menurut Mc Taggart (1997) bahwa action research dapat dilakukan oleh manager, direktur, dosen, guru, atau pekerja sosial lainnya, dan dapat mengandung unsur-unsur; (a) memperbaiki pekerjaannya sendiri, (b) kolaboratif dengan orang atau kelompok lainnya untuk memperbaiki pekerjaan mereka, (c) kolaboratif dengan instansi lain secara terpisah untuk memunculkan proyek atau mengembangkan sistem baru. Masih merujuk Mc Taggart, merupakan langkah-langkah nyata dalam mencari cara yang paling cocok untuk memperbaiki keadaan lingkungan, dan meningkatkan pemahaman terhadap keadaan dan atau lingkungan tersebut. Grundy (1995) menjelaskan bahwa

action research merupakan usaha perbaikan pemahaman, cara dan kondisi yang dilakukan secara kolaboratif. Hal ini juga ditegaskan oleh Sagor (1992) yang mengatakan bahwa action research is conducted by people who want to do something to improve their own situation. Sedikit berbeda dengan Classroom Action Research (CAR) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang lebih mengkhususkan penelitian di dalam kelas dan harus dilakukan oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Hopkins (1993) yang mengatakan PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki dan atau mengembangkan cara mengajar guru.

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama satu bulan penuh, yakni selama kegiatan KKN Tematik Kebencanaan di Desa Bungurasih. Saat awal kegiatan KKN dilakukan, para peneliti juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan KKN ini juga akan dilakukan penelitian tindakan yang melibatkan ibu-ibu dan atau perempuan yang tergabung dalam Dasa Wisma di Desa Bungurasih. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu pemahaman, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun secara lebih terinci, deskripsi kegiatan terkait tiga

		Wisma Siaga Bencana; - Pelaksanaan Kemitraan Dasa Wisma Siaga Bencana dengan Universitas dan BPBD kab. Sidoarjo.	
--	--	---	--

Hasil & Pembahasan

Desa Bungurasih merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 112 5' dan 112 9' bujur timur dan 7 3' dan 7 5' lintang selatan dengan ketinggian ±5 meter dari permukaan laut (mdpl). Secara Geografis, Desa Bungurasih memiliki kedekatan dengan Kota Surabaya dibandingkan dengan pusat Kota Sidoarjo. Desa Bungurasih terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Kasian dan Dusun Bungur. Luas wilayah Desa Bungurasih mencapai 160 (ha). Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2015, Kecamatan Waru termasuk salah satu wilayah rawan bencana dengan ancaman tinggi untuk limbah industri dan indeks ancaman

sedang untuk banjir. Gambaran secara lebih detail terkait indeks risiko bencana per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indeks Risiko Bencana per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No	Nama Kecamatan	GEMPA BUMI		LUMPUR SIDOARJO		LIMBAH INDUSTRI		BANJIR	
		SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS	SKOR	INDEKS
1	Kecamatan Tarik	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	12	SEDANG
2	Kecamatan Balongbendo	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	18	TINGGI
3	Kecamatan Prambon	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	12	SEDANG
4	Kecamatan Tanggulangin	6	SEDANG	22.5	TINGGI	18	TINGGI	18	TINGGI
5	Kecamatan Krian	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	18	TINGGI
6	Kecamatan Wonoayu	6	SEDANG	0	RENDAH	8	SEDANG	12	SEDANG
7	Kecamatan Tulangan	6	SEDANG	0	RENDAH	8	SEDANG	12	SEDANG
8	Kecamatan Taman	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	12	SEDANG
9	Kecamatan Sidoarjo	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	12	SEDANG
10	Kecamatan Candi	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	18	TINGGI
11	Kecamatan Sukodono	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	15	SEDANG
12	Kecamatan Buduran	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	8	SEDANG
13	Kecamatan Krembung	6	SEDANG	0	RENDAH	4	SEDANG	8	SEDANG
14	Kecamatan Gedangan	6	SEDANG	0	RENDAH	12	SEDANG	8	SEDANG
15	Kecamatan Porong	6	SEDANG	22.5	TINGGI	12	SEDANG	18	TINGGI
16	Kecamatan Jabon	5.2	SEDANG	19.5	TINGGI	10.4	SEDANG	12.6	SEDANG
17	Kecamatan Waru	6	SEDANG	0	RENDAH	18	TINGGI	12	SEDANG
18	Kecamatan Sedati	6	SEDANG	0	RENDAH	6	SEDANG	12	SEDANG

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kab. Sidoarjo, 2014-2015

Dalam pemetaan lokasi rawan banjir di Desa Bungurasih, yang dilakukan oleh peneliti dan mahasiswa peserta KKN, tingginya ancaman limbah industri di Kecamatan Waru termasuk di Desa Bungurasih juga berpotensi mengakibatkan banjir terutama di gorong-gorong yang sudah tersumbat oleh limbah industri. Selain itu kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat terutama di selokan atau daerah aliran sungai yang berada di sekita Desa

perempuan secara proaktif membentuk kelompok dan jaringan sosial yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (iv) pengorganisasian masyarakat yang dilaksanakan perempuan terbukti bermanfaat dalam upaya menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (v) sebagai hasil upaya tanggap bencana yang mereka lakukan, kaum perempuan juga berproses dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian dalam lingkungannya dan kemudian secara otomatis masuk ke dalam lapangan kerja.

Dalam beberapa penelitian tentang isu gender dalam penanggulangan bencana, dapat dinyatakan masih belum optimal, bahwa pelaksanaan Perka BNPB 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana di lapangan masih belum efektif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti perempuan. Salah satu penyebabnya adalah masih belum seragamnya prosedur dan penyediaan data terpilah yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan penanganan yang proporsional (Suliana, 2016). Beberapa kebijakan BPBD masih buta gender karena tidak mencantumkan laki-laki ataupun perempuan secara khusus,

terbukti dari kurangnya kebutuhan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sehingga tidak dapat melihat perbedaan-perbedaan gender dalam alokasi peran dan sumber daya. Pembuat kebijakan PB diharapkan tidak netral gender dalam mengimplementasikan kebijakan PB, sehingga menyebabkan kebijakan menjadi kurang spesifik gender. Dengan menambahkan kata “perempuan” dalam kebijakan penanggulangan bencana, tidak menjamin perwujudan keadilan kesetaraan gender dapat terwujud dengan baik. Partisipasi perempuan dalam kebencanaan bukan hanya sebagai objek tetapi juga menjadi subjek aktif sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Perempuan yang memimpin rumah tangga seringkali tidak mampu mengakses layanan karena mereka tidak mendapatkan bantuan untuk merawat anak atau bantuan untuk mengumpulkan air atau kayu bakar. Laki-laki yang memimpin rumah tangga sendirian seringkali memiliki kebutuhan khusus karena mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal memasak, merawat anak kecil, anak-anak atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Asumsi seringkali dibuat berdasarkan persepsi stereotipe atas peran perempuan dan laki-laki. Laki-laki

mengenalikan ancaman bencana di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Komunitas yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengurangi dan menyerap tekanan atau kekuatan destruktif yang potensial melalui adaptasi atau perlawanan; mengelola atau mempertahankan fungsi dasar dan struktur tertentu selama terjadi bencana; memulihkan atau 'bangkit kembali' atau 'melenting balik' setelah terjadi bencana (Twig, 2004).

Kesimpulan

Dasa Wisma sangat berguna bagi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggotanya dalam menghadapi bencana di tempat tinggal mereka. Kelompok Dasa Wisma dan jaringannya sudah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia (Dasa Wisma merupakan program pemerintah sejak Orde Baru), merupakan modal sosial yang sangat strategis. Perlunya ditingkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana, agar cakupan perlindungan terhadap keluarga akan lebih optimal. Sudah banyak terbukti bahwa perempuan menjadi kekuatan yang secara pro-aktif membentuk

jaringan sosial yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Keterlibatan Perempuan Juga terbukti sangat bermanfaat dalam upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana. Dalam konteks Pendidikan Dasawisma, maka mekanismenya adalah : (i) memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai kluster dalam tanggap darurat; (ii) memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang peringatan dini; (iii) mendayagunakan local wisdom atau local knowledge yang ada hubungannya dengan kebencanaan. Sebagai contoh local wisdom di Simelue, yaitu Smong; (iv) strategi pengembangan dasawisma untuk Pendidikan Bencana dilakukan melalui gathering, seni budaya, storytelling (kamishibai di Jepang); dan (v) kegiatan bulanan diadakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, diisi kegiatan berupa sosialisasi penanggulangan bencana, dan pelatihan tim fasilitator untuk membangun kapasitas masyarakat terutama keluarga. Selain itu dalam upaya penyelesaian masalah dalam rangka pelibatan perempuan dalam penanggulangan bencana melalui Dasa Wisma, maka untuk lebih memberikan efek resonansi komunikasi kepada kelompok sasaran

khususnya yang berhubungan dengan isu-isu kebencanaan, perlu didorong terbentuknya Dasa Wisma Siaga Bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.

Daftar Pustaka

BPPD (2015). Dokumen Kajian Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2015,

Grundy, Shirley. (1995). *Action Research as on-Going Professional Development*. Canberra: Accord.

Hopkins, David. (1993). *A Teacher's Guide to Classroom Research*. Philadelphia: Open University Press.

IASC (2006). *Guideline Women, Girls, Boys And Men: Different Needs – Equal Opportunities, Gender Handbook For Humanitarian Action: IASC Principals*

Mc Taggart, R. (1997). "Management Learning". *The Journal for Managerial and Organizational Learning*. Vol. 28, No. 2, June 1997.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan

Gender di Bidang Penanggulangan Bencana

Sagor, Richard. (1992). *How to Conduct Collaborative Action Research*. Alexandria: SCD

Sali Suliana, dkk, 2016. Implementasi Penanggulangan Bencana Yang Responsif Gender. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016.

Twigg, J., (2004). *Disaster Risk Reduction: Mitigation And Preparedness In Development And Emergency Programming*. Good Practice Review no. 9. London: Humanitarian Practice Network, Available at: <http://www.odihpn.org>.